

BPK Jateng Temukan Potensi Kerugian Rp 64,8 M di LKPD

SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng melakukan pemeriksaan pada 36 entitas di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2015, terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp 64,872 Miliar dari 517 temuan.

Hal itu diungkapkan Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Heri Subowo. Heri menjelaskan, dari pemeriksaan LKPD 35 kabupaten/kota dan Provinsi Jateng terdapat 779 kasus yang baru diungkap. Kasus kerugian negara ter-

dapat 153 kasus dengan kerugian Rp 48,875 miliar. Kasus kerugian negara atau daerah terdapat 6 kasus, dengan kerugian negara Rp 3,358 miliar.

Selanjutnya, pada kasus kekurangan penerimaan mencapai 70 kasus dengan angka Rp 10,634 miliar. Kasus ketidakefektifan, ketidak-efisienan, dan ketidakhe-matan mencapai 5 kasus dengan kerugian Rp 2 miliar. Sementara, terdapat 4.148 kasus penyimpangan administrasi, dan 363 kasus kelemahan sistem yang tidak bernilai rupiah.

"Sehingga totalnya Rp 64,872 miliar itu tadi. Dari jumlah kerugian Rp 48 miliar, uang yang sudah dilakukan penyetoran ke dalam aset sebanyak Rp 18,543 miliar," terang Heri usai mengisi workshop BPK bersama media di Kantor BPK RI Perwakilan Jateng, Jalan Perintis Kemerdekaan, Semarang Rabu (26/8).

Sisa penyetoran kerugian, terusnya diselesaikan melalui mekanisme tindak lanjut, yakni sebesar Rp 30 miliar. Perbaikan kerugian negara tersebut bisa dikembalikan melalui kas daerah (Kasda).

"Ini yang disetor saat tim masih di lapangan, atau belum masuk laporan. Sisanya, lahir melalui rekomendasi BPK. Nanti ditindaklanjuti setelah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) diterima dalam waktu 60 hari," urai Heri.

"Kami menganggap prinsip bruto (dalam pengembalian kerugian negara), jadi pengembalian tidak akan mengubah temuan. Meski sudah dibalikin, di lapangan tetep masuk dalam laporan. Kalau tidak dalam laporan, ya kami tidak ada temuan," tandasnya. ■

M9-yan